

**RESISTENSI REMAJA TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
DISKRIMINASI GENDER DI KOTA LHOKSEUMAWE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RANNY ISKALIANA HAYYATUNNISAH

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama
NIM: 210305004



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2025 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ranny Iskaliana Hayyatunnisah

Nim : 210305004

Jenjang : Strata Satu (1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Banda Aceh, 28 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Ranny Iskaliana Hayyatunnisah

210305004

**RESISTENSI REMAJA TERHADAP KEBIJAKAN DISKRIMINASI
GENDER DIKOTA LHKSEUMAWE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh
Ranny Iskaliana Hayyatunnisah
NIM.210305004

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasahkan* oleh:

Pembimbing I


Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag
NIP: 1979050820006041001

Pembimbing II


Musdawati, M.A.
NIP:1975091020090120020

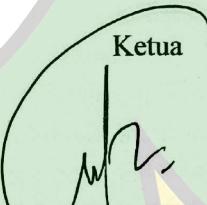
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN AR-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama
Pada Hari/Tanggal:

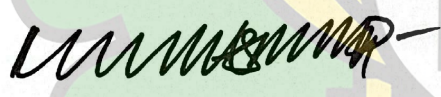
Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

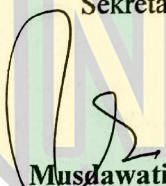
Ketua


Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag
NIP. 1979050820006041001

Anggota I


Dr. Syarifuddin Abe, M.Hum
NIP: 197212232007101001

Sekretaris


Musdawati, M.A.
NIP. 1975091020090120020

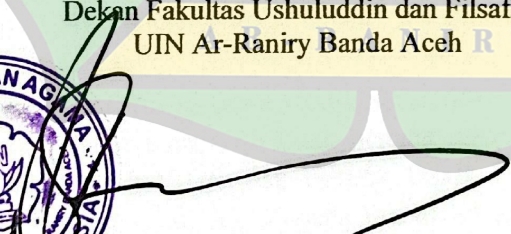
Anggota II


Fatimahsyam, M.A.
NIP: 197212132023212006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 19780422003121001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, atas limpahan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, serta tidak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Shallallaahu 'AlaihiwaSallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Resistensi Remaja Terhadap Implementasi Kebijakan Diskriminasi Gender Di Kota Lhokseumawe".

Penulisan Skripsi ini diajukan sebagai syarat tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Disadari bahwa penyusunan Skripsi ini mengalami kesulitan, hambatan dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka ini dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan.

Perjalanan akademik yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran ini tidak mungkin dapat dilalui tanpa kehadiran orang-orang yang begitu berharga. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tulus, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya Papa tercinta Iskandar.S dan Mama tercinta Murliana, telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa untuk saya yang telah mengorbankan waktu, tenaga serta selalu mendukung, selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa sehingga selalu ada motivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib. Lc., M. Ag. Kepada Ibu Musdawati, M.A. sebagai ketua Program Studi Sosiologi Agama, Bapak Nofal Liata, M. Si sebagai sekretaris Program Studi Sosiologi Agama. Ucapan terimakasih juga kepada Dosen dan asisten serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

3. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan dan juga petunjuk dari Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag, selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Ibu Musdawati, M.A. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik yang membangun untuk kebaikan penulisan skripsi ini sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
4. Terima kasih kepada Zulfiana Khaira, Faiza Zakiatul Syadza, Nadira Fatimah Fitri, Mauliza Rizky dan Tasya Wiraning yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam momen-momen sulit selama penulisan skripsi dan teman-teman seperjuangan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
5. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri yang sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga kepada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Pada akhirnya, penting untuk menyadari bahwa Allah SWT memiliki semua kualitas kesempurnaan, sedangkan segala kekurangan atau ketidaksempurnaan hanya ada pada penulisnya. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyambut dan menghargai setiap saran dan kritik yang membangun yang dapat membantu menyempurnakan karya ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Yarabbal'alamin.*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Nama : Ranny Iskaliana Hayyatunnisah
Judul Skripsi : Resistensi Remaja Terhadap Implementasi Kebijakan Diskriminasi Gender Dikota Lhokseumawe
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing 1 : Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag
Pembimbing 2 : Musdawati, M.A.

Penelitian ini membahas bagaimana remaja perempuan melakukan perlawanan terhadap implementasi kebijakan pemerintah Kota Lhokseumawe yang dianggap membatasi kebebasan perempuan. Beberapa kebijakan tersebut adalah larangan keluar malam bagi perempuan, membatasi jam kerja bagi pramusaji wanita tidak boleh diatas jam 21.00 serta larangan duduk mengangkang di motor bagi perempuan. Kebijakan-kebijakan ini dinilai oleh sebagian perempuan sebagai bentuk diskriminasi gender. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 8 orang informan, yang terdiri remaja perempuan dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa pendatang dan perempuan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan melakukan resistensi dalam bentuk yang beragam. Ada yang tetap keluar malam secara sembunyi-sembunyi untuk bekerja atau belajar, ada yang menyamar agar tidak terlihat oleh petugas dan ada juga yang hanya mematuhi aturan di depan umum, namun melanggarnya secara diam-diam. Bentuk perlawanan ini tidak dilakukan secara terbuka atau melawan langsung, tetapi dilakukan secara tenang dan tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun bersifat kecil dan tidak terlihat secara langsung, tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk resistensi terhadap kontrol sosial yang dianggap tidak adil bagi perempuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iv
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	6
KAJIAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Kerangka Teori	10
C. Definisi Operasional Variabel.....	12
BAB III.....	15
METODE PENELITIAN.....	15
A. Jenis Penelitian	15
B. Lokasi Penelitian.....	16
C. Informan Penelitian.....	17
D. Sumber Data	19
E. Teknik Pengumpulan Data.....	20
F. Teknik Analisis Data	22

BAB IV	25
HASIL PENELITIAN.....	25
A. Gambaran Umum Kota Lhokseumawe	25
B. Kebijakan Diskriminatif Gender di Indonesia	30
C. Kebijakan Diskriminasi Gender di Kota Lhokseumawe.....	36
D. Faktor Resistensi Remaja Terhadap Kebijakan Diskriminasi Gender di Kota Lhokseumawe	42
1. Faktor Kebutuhan Ekonomi	43
2. Faktor Keamanan dan Keselamatan	44
3. Faktor Ketimpangan Perlakuan Gender	47
4. Faktor Ketidaksesuaian Antara Kebijakan dan Realitas Sosial	49
5. Faktor Ketimpangan Gender dalam Dunia Kerja.....	50
E. Bentuk Resistensi Remaja Terhadap Kebijakan Diskriminasi Gender di Kota Lhokseumawe	51
1. Pengabaian Aturan Secara Diam-Diam.....	52
2. Menyiasati Razia	52
3. Melanjutkan Aktivitas Secara Diam-Diam	54
F. Analisis.....	55
BAB V.....	57
PENUTUP	57
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
C. Analisis	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Observasi.....	60
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara.....	70
Lampiran 3 : SK Pembimbing Penelitian.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keragaman budaya dan etnis, selalu berkomitmen untuk membangun masyarakat yang adil, setara, dan berkeadilan. Namun, masih ada banyak masalah yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan diskriminasi gender. Salah satu masalah yang signifikan adalah diskriminasi gender, yang merusak hak-hak dasar perempuan dan mempertanyakan prinsip kesetaraan gender yang universal. Kota Lhokseumawe adalah salah satu kota yang menarik perhatian dalam hal ini.

Kota ini, yang terletak di provinsi Aceh, memiliki sejarah dan budaya yang kaya, tetapi juga menghadapi banyak tantangan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender. Kebijakan diskriminasi gender di Kota Lhokseumawe telah menarik perhatian masyarakat dan menuai berbagai reaksi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu dasar utama untuk mengidentifikasi masalah sosial adalah penelitian dan pemahaman sejarah masyarakat tentang kebijakan diskriminasi gender.

Kota Lhokseumawe, yang termasuk dalam wilayah istimewa Aceh, terkenal dengan penerapan hukum Islamnya yang unik. Tujuan pemerintah kota adalah untuk memastikan ketertiban, etika, dan prinsip Islam di ruang publik melalui penerapan beberapa kebijakan. Namun, kebijakan-kebijakan ini seringkali menimbulkan kontroversi saat diterapkan karena berdampak langsung pada kebebasan dan kebebasan perempuan, terutama remaja.

Kebijakan diskriminasi gender di Kota Lhokseumawe sering sekali muncul sebagai bagian dari upaya menjaga norma sosial dan nilai-nilai keislaman yang telah lama dianut oleh masyarakat. Sejak Aceh memperoleh otonomi khusus dan menerapkan syariat Islam, berbagai peraturan daerah mulai membatasi peran dan kebebasan perempuan di ruang publik. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial dan membuat huru hara masyarakat adalah larangan bagi perempuan untuk duduk mengangkang di atas sepeda motor, yang pertama kali diperkenalkan melalui Surat Edaran Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2013.

Pada 2 Januari 2013 surat edaran bernomor 002/2013 tersebut secara resmi diberlakukan mulai 7 Januari 2013. Surat ini ditandatangani oleh Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Ketua DPR Kota Lhokseumawe Saifuddin

Yunus, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Lhokseumawe Tgk H Asnawi Abdullah, dan Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tgk H Usman Budiman. Kebijakan ini dirancang dengan alasan untuk menjaga kesopanan perempuan, menyesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip syariat Islam, serta mencegah perilaku yang dianggap tidak pantas dalam budaya setempat. Pemerintah setempat beranggapan bahwa perempuan yang duduk mengangkang di sepeda motor dapat memancing perhatian dan bertentangan dengan norma kesopanan umum yang berlaku.¹

Kebijakan lain yang juga berdampak besar adalah pembatasan jam kerja malam bagi perempuan. Wali Kota Lhokseumawe, Aceh, Suaidi Yahya mengeluarkan surat edaran dan menetapkan pembatasan jam kerja bagi pramusaji wanita. Perempuan yang bekerja di kafe hanya boleh bekerja hingga pukul 21.00 WIB. Aturan ini tertera dalam surat yang bernomor 451.48/26 yang berisi tentang perihal tentang "Penertiban konsumen/pengunjung pada tempat usaha kuliner, kafe dan perhotelan". Sejak tanggal 6 Januari 2020, pekerja perempuan hanya diizinkan bekerja maksimal hingga pukul 21.00 WIB di tempat usaha seperti kafe dan warung internet, untuk menjaga ketertiban dan moralitas.²

Selain pengaruh kebijakan lokal, Lhokseumawe juga terkena dampak oleh kebijakan serupa dari Kabupaten Aceh Utara. Pada tanggal 10 Juli, di Masjid Agung Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Aceh Utara, serta Forum Silaturahmi Organisasi Masyarakat se-Aceh Utara menyepakati sebuah seruan bersama mengenai pembatasan aktivitas perempuan di malam hari. Dalam kegiatan yang dihadiri langsung oleh Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, sebanyak 28 organisasi masyarakat turut menandatangani komitmen tersebut. Isi seruan bersama ini menganjurkan agar perempuan, khususnya remaja usia

¹ Hetifah Sjaifudian, "Penindasan Perda Terhadap Perempuan," 1 Juni 2013, 2013, <https://hetifah.id/artikel/penindasan-perda-terhadap-perempuan.html>.

² Agus Setyadi, "Wali Kota Lhokseumawe Batasi Jam Kerja Perempuan Hingga Pukul 9 Malam," 13 Januari 2020, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4856909/walkot-lhokseumawe-batasi-jam-kerja-perempuan-hingga-pukul-9-malam>.

sekolah, tidak keluar rumah pada malam hari tanpa didampingi suami atau mahram.³

Kemudian kesepakatan ini menjadi dasar sosial dan kultural yang memengaruhi kebijakan pembatasan ruang gerak perempuan di daerah sekitar, termasuk Kota Lhokseumawe, yang sangat dekat secara geografis dan budaya dengan Aceh Utara. Akibatnya, norma tentang perilaku perempuan di ruang public menjadi lebih perketat, dan menjadi tekanan sosial bagi perempuan yang memiliki keperluan dan kebutuhan di luar rumah pada malam hari, baik untuk bekerja, belajar, dan aktivitas sehari-hari lainnya.

Namun, sejak diberlakukan, kebijakan ini menuai dan mendapatkan banyak kritik, baik dari masyarakat lokal maupun organisasi hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi gender karena lebih membatasi kebebasan perempuan generasi muda, serta mencerminkan kontrol berlebihan terhadap tubuh dan perilaku perempuan di ruang publik. Bagi generasi muda, khususnya remaja, aturan ini dianggap membatasi kebebasan mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan mengekspresikan diri mereka dengan selayaknya yang mereka mau.

Remaja lebih kritis terhadap aturan yang dianggap tidak adil karena mereka menjadi generasi yang tumbuh di era digital dan ingin memiliki akses luas ke informasi global. Tidak setuju dengan kebijakan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti melanggar aturan secara sengaja, menyatakan ketidaksetujuan melalui media sosial, dan diam-diam. Jenis resistensi ini tidak hanya menunjukkan ketidaksetujuan, tetapi juga menunjukkan pergeseran perspektif dari generasi muda. Selain alasan menjaga norma kesopanan dan syariat Islam, kebijakan ini juga dibuat dan lahir dari kekhawatiran pemerintah terhadap meningkatnya pengaruh budaya asing yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Selain itu juga ada alasan lain untuk kebijakan ini yaitu globalisasi dan arus informasi yang semakin mudah diakses membuat perubahan sosial di Aceh, termasuk di Kota Lhokseumawe, terjadi lebih cepat. Pemerintah daerah melihat fenomena ini sebagai ancaman terhadap identitas

³ Inmas Aceh, "Kemenag Aceh Utara Menandatangani Seruan Bersama Agar Wanita Tidak Keluar Malam Hari," 10 Juli 2019, 2019, <https://aceh.kemenag.go.id/baca/kakankemenag-aceh-utara-menandatangani-seruan-bersama-agar-wanita-tidak-keluar-malam-hari>.

budaya Aceh, sehingga merasa perlu menerapkan aturan yang lebih ketat, terutama terkait dengan peran dan perilaku perempuan dalam masyarakat.⁴

Kebijakan ini juga memperkuat stereotip gender dalam masyarakat, menyatakan bahwa perempuan harus selalu tunduk pada norma tertentu, sementara laki-laki memiliki kebebasan yang lebih besar untuk beraktivitas di ruang publik. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksamaan gender lebih lanjut dalam berbagai aspek kehidupan kita, seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial.

Resistensi ini dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan. Ada perbedaan pendapat antara orang tua dan anak tentang aturan ini dalam keluarga. Orang tua sering mengikuti aturan karena dianggap sesuai dengan adat dan agama, tetapi anak-anak mereka justru mempertanyakan nilainya. Tidak hanya guru tetapi juga siswa menghadapi kesulitan dalam menanggapi kebijakan ini di lingkungan sekolah. Ini terutama berlaku untuk guru yang harus mematuhi aturan tetapi juga mengetahui kesulitan siswa.

Selain itu, hubungan antara pemerintah dan masyarakat juga dipengaruhi oleh resistensi ini. Remaja yang tidak puas dengan kebijakan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara tujuan pemerintah dan keinginan generasi muda. Ketegangan sosial dapat meningkat di masa depan jika resistensi ini terus muncul tanpa ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.

Akibatnya, penting bagi pemerintah untuk merevisi kebijakan ini dan mempertimbangkan metode yang lebih partisipatif dalam pembuatan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan gender dan generasi muda. Diharapkan penelitian ini akan membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih adil dan memungkinkan generasi muda berbicara dengan pemerintah, masyarakat, dan generasi lain tentang cara membangun lingkungan sosial yang lebih harmonis.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini meliputi :

1. Apa faktor-faktor yang mendorong remaja untuk menolak kebijakan diskriminasi gender tersebut?

⁴ Iromi Ilham, "Kebijakan dan Ekspresi Kebudayaan; Sebuah Dilema? (Meninjau Kembali Kebijakan Kontroversial terkait Perempuan dan Ekspresi Kebudayaan)," *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 3, No. 1 (April 2019), hlm. 52.

- 2 . Bagaimana bentuk resistensi remaja terhadap kebijakan diskriminasi gender di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendorong remaja untuk menolak kebijakan diskriminasi gender.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk resistensi remaja terhadap kebijakan diskriminasi gender di Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kebijakan yang membatasi kebebasan individu, terutama perempuan, perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial.
2. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam kepada remaja tentang pentingnya menyuarakan pendapat mereka secara konstruktif terkait kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

